**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Demokrasi adalah pilar kebangsaan yang menyelenggarakan roda pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yaitu sejahtera dari perspektif lahir dan perspektif batin. Komitmen berdemokrasi bagi bangsa Indonesia sudah lahir sejak masa pra kemerdekaan kemudian dimantapkan secara konstitisional setelah kemerdekaan.[[1]](#footnote-1)

Sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa memang merupakan idaman semua orang. Sila pertama dari pancasila menyebutkan bahwa dasar pertama dari negara Indonesia adalah ketuhanan yang maha esa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa penyelenggara negara harus selalu berlandaskan sila pertama pancasila.

Fenomena komunikasi politik di Indonesia mengalami perubahan yang cepat beberapa tahun terahir ini. Reformasi bisa jadi merupakan pintu gerbang yang membawa perubahan dalam sistem, pola pikir, maupun prilaku kehidupan sosial dan politik bagi masyarakat di Indonesia. Era yang berawal pada 1998 dan terus berlangsung hingga saat ini, secara langsung ikut memberi dampak bagi perkembangan sistem komunikasi media massa yang ada di Indonesia. Salah satu indikator perubahan dalam konteks media adalah menjamurnya kader-kader dari berbagai partai politik beragam disertai sistem pengelolaan yang lebih independen dari masa sebelumnya.[[2]](#footnote-2)

Hal serupa pun terjadi pada lapangan yang penulis teliti, ada ruang fenomenologi yang seakan tergambar dan menarik untuk dibahas dalam pola komonikasi politik anggota DPRD Kab. OKI. Adanya ruang fraksi seperti menambah kewajaran dalam komunikasi politik yang terjadi antara satu fraksi dengan fraksi lainya.

Secara definitif,  ada beberapa pendapat mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang-kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekcokan.

Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik. Mengenai  komunikasi politik ini *(political communication)* Kantaprawira sebagaimana dikutip oleh Heru Budianto : memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.[[3]](#footnote-3)

Dengan demikian segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijakan *(policy)* harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi.

Berpijak dari empat pola kominikasi yaitu vertikal, horizontal, formal dan informal ada fenomenologi yang menarik untuk diteliti. Seakan ada sesuatu yang membatasi antara satu pola dan pola yang lainya dan ada keadaan yang berbeda ketika terjadi interaksi pola komunikasi vertikal ataupun pola komunikasi yang lainnya.

Misalnya pola komunikasi vertikal yakni dari pimpinan kepada yang dipimpin, sedangkan dalam keanggotaannya sendiri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri dari orang-orang yang tentu saja berbeda latar belakang partai yang mengusung mereka. Apa lagi saat ini fraksi yang paling banyak mendapat kursi pada kenggotaan DPRD secara mutlak dengan sendirinya anggota dari faraksi yang paling banyak mendapat kursilah yang menjadi ketua.

Begitu juga ketika terjadi pola komunikasi horizontal ada dua kemungkinan yang biasanya terjadi : antar individu ataupun antar kelompok yang lainnya, komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal) serta komunikasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur organisasi).

Suasana pola-pola di atas dibuat semakin menarik ketika ada faktor internal maupun eksternal juga media yang terkadang memvariasikan dan membumbui terjadinya pola-pola komunikasi di atas. Misalnya kepiawaan media memberitakan suatu agenda kerja dari salah satu anggota DPRD yang terkadang sesuatu yang tidak menarik di buat semenarik mungkin dan terkadang malah sebaliknya.

Dilihat dari tujuan politik *“an sich”*, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu  dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideology tersebut dapat diwujudkan.[[4]](#footnote-4)

Sebagaimana dikutip oleh Lasswell memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa *komunikasi politik* selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikai politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.[[5]](#footnote-5)

Banyak sekali pandangan mengenai bagaimana fenomena komunikasi poltik menjadi sebuah kegiatan interaksi para anggota DPRD ini, tingggal orientasi masing-masing individula yang menghantarkan kualitas komunikasi dari masing-masing orang tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam pola komunikasi politik adalah salah satu bagian penting dalam keberlangsungan kegiatan para anggota DPRD yang ada di Kab. OKI. Adanya faktor penghambat dan pendukung menjadikan penelitian ini semakin menarik. Dari keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk

meneliti hal ini yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : *“POLA KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD (STUDI TERHADAP FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DI KAB. OKI)”*

1. **Batasan Masalah**

 Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dijelaskan agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan maka penulis memberi batasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan pada fraksi partai Golongan Karya yang terdiri dari 5 orang.

1. **Rumusan Masalah**

 Untuk lebih jelas dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanapola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI ?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI ?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
	1. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui pola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI
3. **Kegunaan Penelitian**
4. Kegunaan Teoritis

Memberikan analis ilmiah mengenai pola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI.

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadikan masukan bagi fraksi yang bersangkutan, agar menjadi pertimbangan dan memajukan kualitas khususya bagi objek penelitian dan umumya untuk semua, serta sebagai sumbangan karya ilmiah kepada almamater Fakultas Dakwah Dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang.

1. **Kerangka Teori**

Sebelum mengetahui lebih jauh tentang pola komunikasi politik tentunya harus tahu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain, dengan cara menggunakan media sebagai kemasan informasi atau melalui transmisi secara simbolik, sehingga informasi mudah difahami dan pada akhirnya mereka saling memiliki kesamaan persepsi. Komunikasi memiliki komponen dasar di dalamnya. Komponen dasar tersebut ialah :

1. Komunikator/pengirim

2. Pesan

3. Media

 4. Komunikan/Penerima

5. Interaksi

6. Pemahaman[[6]](#footnote-6)

Dari sekian komponen tersebut jika melakukan kerja maka akan membentuk proses komunikasi yang saling berkaitan dan timbal balik.Setelah mengetahui tentang penjelasan terhadap komunikasi maka untuk selanjutnya akan dijelaskan masalah pengertian dari komunikasi politik. Banyak sekali para ahli menyampaikan pendapat tentang definisi komunikasi politik. Tetapi pada dasarnya inti dari pernyataan para ahli adalah sama. Seorang ahli Michael Rush dan Phillip Althoff menjelaskan “komunikasi politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.[[7]](#footnote-7)

Menurut Almond dan Powell sebagaimana dikutip Rusnaini : “Komunikasi politik merupakan suatu fungsi sistem yang mendasar (*basic function of the system*) dengan konsekuensi yang banyak untuk pemeliharaan ataupun perubahan dalam kebudayaan politik dan struktur politik. Seseorang tentunya dapat mengasumsikan bahwa semua perubahan penting dalam sistem politik akan menyangkut perubahan dalam pola-pola komunikasi, dan biasanya baik sebagai penyebab maupun akibat. Semua proses sosialisasi misalnya, merupakan proses komunikasi, meskipun komunikasi tidak harus selalu menghasilkan perubahan sikap (*attitude change)*.[[8]](#footnote-8)”

1. **Pola-pola Komunikasi Politik**
	1. Pola komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada yang dipimpin)
	2. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok)
	3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal)
	4. Pola komunikasi informal ( komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori – teori sebagai dasar ilmiah dalam penulisan skripsi.

1. **Metodologi Penelitian**
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian
3. Jenis Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan tujuan langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan denganpola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI.
4. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.[[10]](#footnote-10)
5. Jenis dan Sumber Data
6. Jenis data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang meliputi tentangpola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya tersebut apakah baik atau buruk yang kemudian dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan (personali) yang sudah peneliti tentukan.

1. Sumber data

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari tangan pertama, yaitu anggota DPRD Kab. OKI dari fraksi partai Golongan Karya. Sumber data skunder adalah sumber data yang diambil dari objek pendukung seperti dokumentasi yang ada di DPRD Kab. OKI.

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Metode observasi adalah pengambilan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung, di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung Bagaimanapola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI.
3. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data berupa Tanya jawab pada orang yang menjadi sumber data. Melalui metode ini dapat mengajukan pertannyaan yang mengenai Bagaimanapola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI.
4. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang dilakukan dengan cara melihat arsif atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian khususnya pola komunikasi, serta kegiatan yang ada di kantor DPRD Kab. OKI.

d. *Focus Group Discussion*( FGD) merupakan bentuk penelitian kualitatif dimana sekelompok orang yang bertanya tentang objek penelitian.[[11]](#footnote-11) Metode diskusi ini dapat dilakukan dengan membagi sekelompok orang untuk mendiskusikan satu topik tertentu secara relatif mendalam. Jadi metode ini adalah cara untuk pengambilan data dengan melalui jalan diskusi dengan anggota DPRD dari fraksi partai Golongan Karya yang ada pada DPRD Kab. OKI tersebut agar data yang diambil oleh peneliti lebih akurat keabsahannya.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai serta diminta informasi oleh peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informen ini menguasai dan memahami data informasi, ataupun fakta dari obyek penelitian, dengan kata lain orang yang ada pada latar penelitian dimanfaatkan untuk memberi informasi situasi dan kondisi. Adapun informan menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian.[[12]](#footnote-12) Informan penelitian ini adalah semua anggota DPRD dari fraksi partai Golongan Karya.

Merujuk dari beberapa katagori tersebut, maka peneliti akan mengambil beberapa orang untuk menjadi informan dalam penelitian ini sebannyak 5 orang. Jadi seorang informan haruslah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam latar penelitian dan suka rela menjadi anggota tim dan dapat memberikan pandangan dari segi orang mulai dari nilai-nilai,sikap, sosial budaya yang menjadikan latar belakang peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data mempergunakan tekhnik analisis data deskriptif kualitatif. Suatu analisis yang bersifat menguraikan, menggambarkan atau menjelaskan seluruh yang ada pada rumusan masalah secara jelas, kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat ke khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Ada beberapa bentuk  data kualitatif dari model Miles dan Huberman :

1. Data Reduction

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting selanjutnya mencari tema dan polanya.

1. Data Display

Yaitu Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* atau gambar.

1. *Conclusion Drawing/Verification*

Yaitu Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah bila terdapat bukti-bukti baru. Namun jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut kesimpulan yang kredibel.[[13]](#footnote-13)

1. **Sistematika Pembahasan**

Adapun yang menjadi sistematika dalam pemabahsan ini adalah:

 Bab I : Mengemukakan pendahuluan yang melipuri latar belakang masalah,batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustakaa, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

 Bab II : mengemukakan landasan teori, dalam bab ini meliputi tentang pengertian pola komunikasi, pengertian politik, pola komunikasi politik, serta penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukung dari pola komunikasi politik tersebut.

 Bab III : kawasan penelitian meliputi keadaan umum DPRD Kab. OKI, historis, dan geografisnya, keadaan keanggotaan, keadaan tenaga administrasi, sarana dan prasarana, dan lain lain.

 Bab IV : hasil penelitian meliputi pola komunikasi politik anggota DPRD dan Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pola komunikasi politik anggota DPRD fraksi partai Golongan Karya di Kab. OKI.

 Bab V : Kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran.

1. Heri Junaidi, *Komunikasi Ulama Dan Umara,* (Palembang, Hasil Muktamar Umara : 2005), hlm. 17 [↑](#footnote-ref-1)
2. Heru Budianto dan Faris Hamid, *Ilmu Komunikasi,* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 258 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* hlm. 270 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik di Indonesia*, (Sinar Baru: Bandung, 1983), hlm. 25 [↑](#footnote-ref-4)
5. Varma, S.P.*Teori Politik Modern*,( PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995) hlm. 258 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rusnaini, *Pengantar Sosiologi Politik* (Rineke Cipta:Semarang, 2007), hlm. 34 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid,* hlm 40 [↑](#footnote-ref-7)
8. I*bid,* hlm 30 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-9)
10. Saiful Azwar, *Metode Penelitian,* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5 [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://luzman-interisti.blogspot.com/2008/12/focus-group-discussion.html> Diakses 11 Maret 2013 [↑](#footnote-ref-11)
12. http://www.bahter a.org/kateglo/?mod=dicnioary&action=view&phrase=informan Diakses 11 Maret 2013 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mathew B Malls dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Diterjemakan Oleh Tjetjep Rohendi Rahidi,* (Jakarta : UI, 1992), hal. 16-18. [↑](#footnote-ref-13)